

## Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan

Nada Aulia<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 13 Juni 2023

Direvisi pada tanggal 13 Maret 2024

Diterima pada tanggal 20 Maret 2024

Terbit online pada tanggal 27 Maret 2024

#### Kata Kunci:

Kebijakan, Pendidikan, Sistem Zonasi



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

### Penulis Korespondensi:

\*Nada Aulia

Email: [nadaauliaaulia@gmail.com](mailto:nadaauliaaulia@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemangku kebijakan guna memajukan keunggulan SDM. Mutu pendidikan merupakan dasar dalam menambah ilmu pengetahuan, sehingga terbentuk karakter bangsa yang siap berkualitas. Sistem pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara singkat dapat dipahami bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memastikan bahwa semua warga Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, mampu mengikuti perubahan dunia, teknologi informasi, oleh sebab itu, hendaknya penyempurnaan pada sistem pendidikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pemerataan pendidikan ialah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan dapat dilaksanakan melalui sistem zonasi. Kebijakan zonasi dalam pemerataan

pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa akses pendidikan yang berkualitas dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat di Indonesia, tanpa memandang dari latar belakang ekonomi, agama, sosial, budaya mereka.

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu tujuan sistem pendidikan nasional. Diantara kebijakan yang diterapkan untuk mewujudkan hal ini adalah kebijakan zonasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi siswa di sekolah-sekolah di setiap wilayah, dengan cara menentukan batas-batas wilayah atau zona tertentu yang membatasi siswa dalam memilih sekolah.

Sistem zonasi adalah suatu bentuk sistem penerimaan calon siswa dengan cara sekolah diwajibkan menerima calon siswa yang bertempat tinggal di area terdekat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan di tiap-tiap sekolah di Indonesia. Sistem zonasi dimaksudkan agar predikat sekolah favorit tidak menjadi tolak ukur bagus tidaknya sekolah. Keberadaan sistem zonasi diharapkan dapat membantu terciptanya mutu pendidikan yang bersifat menyeluruh di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan dan informasi dengan cara mengikhtisarkan materi-materi yang berakar dari jurnal, artikel ilmiah, penelitian, dan buku. Dalam hal ini, peneliti mengkaji artikel ilmiah terkait fenomena-fenomena kebijakan zonasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Kebijakan Pendidikan**

Dalam Risnawan (2017), kebijakan ialah kegiatan politik yang dilakukan secara sadar melalui gagasan yang sistematis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, lembaga, institusi, dalam pemecahan masalah guna memperoleh keputusan yang sejalan dengan capaian yang telah ditentukan. Kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan dalam menguraikan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan dengan cara penguraian visi dan misi sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai dalam periode waktu tertentu.

### **Pengertian Kebijakan Zonasi**

Kebijakan zonasi adalah kebijakan yang mengatur penempatan siswa di sekolah yang berada di zona terdekat dari tempat tinggal mereka. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan juga mengurangi beban biaya transportasi siswa.

Kebijakan zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi wilayah penerimaan siswa di suatu sekolah. Dalam kebijakan ini, wilayah penerimaan siswa di suatu sekolah dibatasi dan hanya siswa yang berada dalam wilayah tersebut yang berhak untuk mendaftar dan diterima di sekolah tersebut.

Dengan demikian, kebijakan zonasi diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan serta mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan zonasi dilakukan dengan membagi wilayah menjadi beberapa zona, dan membatasi peserta didik dalam menetapkan sekolah di zona yang sesuai dengan domisili tempat tinggal mereka. Dalam pelaksanaannya, kebijakan zonasi diawali dengan penetapan batas-batas wilayah atau zona oleh pemerintah daerah. Setiap zona diwakili oleh satu atau beberapa sekolah yang berada di dalamnya. Selanjutnya, siswa yang berada di zona tersebut wajib mendaftar dan memilih sekolah yang terletak di dalam zona tersebut.

### **Tahapan Pengimplementasian Kebijakan Zonasi**

Implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan dilakukan dengan cara membagi wilayah suatu daerah menjadi beberapa zona. Setiap zona memiliki sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah zona, yang menjadi pilihan utama bagi siswa yang tinggal di zona tersebut. Pada dasarnya, kebijakan zonasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, serta antara daerah yang kaya dan miskin.

Dalam implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan, terdapat tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Beberapa tahapan tersebut antara lain:

1. **Penetapan Wilayah Zonasi**

Tahap awal yang dilakukan dalam implementasi kebijakan zonasi adalah penetapan wilayah zonasi. Wilayah zonasi ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jarak, ketersediaan transportasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dan kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.

2. **Pemberitahuan Kepada Masyarakat**

Setelah wilayah zonasi ditetapkan, selanjutnya adalah memberitahukan kebijakan zonasi kepada masyarakat melalui media sosial, papan pengumuman, surat kabar, dan media lainnya. Dalam pemberitahuan ini, harus dijelaskan mengenai batas wilayah zonasi, persyaratan pendaftaran, dan mekanisme pendaftaran.

3. **Pendaftaran Siswa**

Setelah pemberitahuan dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuka pendaftaran siswa. Siswa yang berada di dalam wilayah zonasi dapat mendaftar di sekolah yang ditentukan. Dalam mekanisme pendaftaran, harus dijelaskan mengenai persyaratan pendaftaran dan dokumen yang harus disertakan.

4. **Seleksi Penerimaan Siswa**

Setelah pendaftaran dilakukan, langkah selanjutnya adalah seleksi penerimaan siswa. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah,

seperti nilai ujian nasional atau ujian sekolah lainnya. Siswa yang lolos seleksi akan diterima di sekolah yang ditentukan.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi

Setelah kebijakan zonasi diterapkan, pemerintah dan sekolah harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan zonasi mampu meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

### **Pelaksanaan Kebijakan Zonasi dalam Rangka Pemerataan Pendidikan**

#### 1. Penerapan Sistem Seleksi Siswa Berbasis Zona

Sistem seleksi siswa berbasis zona ini dilakukan dengan cara memberikan prioritas kepada siswa yang berasal dari zona sekolah tertentu. Dalam hal ini, siswa yang tinggal di zona sekolah yang sama dengan sekolah yang dituju akan mendapatkan prioritas dalam penerimaan di sekolah tersebut.

#### 2. Penempatan Guru Berdasarkan Kebutuhan Zona

Kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan juga dapat dilakukan dengan cara menempatkan guru berdasarkan kebutuhan zona. Artinya, guru-guru yang ditugaskan di suatu zona harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.

#### 3. Penempatan Anggaran Berdasarkan Kebutuhan Zona

Penempatan anggaran dalam pemerataan pendidikan juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan zona. Pemerintah dapat memberikan anggaran yang lebih besar pada zona-zona yang memiliki tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendidikan yang lebih tinggi, untuk memastikan bahwa pendidikan di wilayah tersebut terpenuhi dengan baik.

#### 4. Peningkatan Kualitas Sekolah di Zona Terdepan

Peningkatan kualitas sekolah di zona terdepan juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. Sekolah-sekolah yang terletak di zona yang lebih maju dan berkembang dapat menjadi role model bagi sekolah-sekolah di zona lainnya. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan bantuan dan dukungan agar sekolah-sekolah di zona terdepan dapat menjadi lebih baik lagi.

### **Alasan Pemerintah Menetapkan Kebijakan Zonasi**

Dengan diterapkannya kebijakan zonasi ini, maka diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Hal ini dikarenakan dengan membatasi pilihan sekolah, maka siswa akan lebih terdistribusi secara merata di sekolah-sekolah yang ada di setiap wilayah. Sehingga, sekolah-sekolah di wilayah tertentu tidak akan terkesan sepi karena minimnya siswa, dan di wilayah lain terlihat padat dengan jumlah siswa yang berlebihan.

Kebijakan sistem zonasi mampu memajukan kualitas pendidikan. Dengan terdistribusinya siswa secara merata, maka setiap sekolah akan memiliki jumlah

peserta didik yang cukup sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik pula. Hal ini dapat memicu terjadinya kompetisi positif antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena setiap sekolah akan berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menarik minat siswa.

### **Tantangan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Zonasi**

Kebijakan zonasi adalah suatu proses penerimaan calon siswa baru berdasarkan jangkauan peserta didik di tempat tinggal ke sekolah. Kebijakan zonasi ini memiliki beberapa dampak positif, seperti pemerataan pendidikan menjadi lebih terealisasi karena label sekolah favorit tidak berlaku lagi, mengantisipasi kasus peserta didik datang terlambat ke sekolah yang secara tidak langsung melatih sikap disiplin peserta didik, hemat biaya transportasi.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang muncul ketika kebijakan zonasi dilaksanakan, beberapa tantangan yang muncul adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di beberapa wilayah, sehingga siswa cenderung memilih sekolah di wilayah lain yang dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Selain itu, masih ada beberapa sekolah yang kurang kualitas pendidikannya, sehingga kebijakan zonasi dapat membuat siswa terpaksa memilih sekolah yang tidak diinginkan.

Kendala lainnya yang sering terjadi adalah masalah infrastruktur sekolah yang tidak memadai pada zona tertentu, sehingga siswa yang tinggal di zona tersebut sulit untuk mengakses fasilitas pendidikan yang optimal. Kendala lainnya ialah dalam hal penentuan zona yang adil dan efektif, terutama di daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi dan mobilitas tinggi.

### **Strategi Menghadapi Tantangan Kebijakan Zonasi**

Sistem zonasi membantu dalam mempercepat proses pembangunan pendidikan yang bermutu, merata, berkeadilan sebagai integrasi pelayanan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan, di antaranya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di setiap wilayah, baik melalui peningkatan kualitas guru, fasilitas, maupun kurikulum. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan zonasi yang telah diterapkan, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dan dicari solusinya. Dalam melaksanakan kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan, dibutuhkan dukungan dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan anggaran pendidikan yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan zonasi, serta menjamin kualitas pendidikan di seluruh sekolah yang ada. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan institusi yang berkepentingan dalam penentuan zona yang tepat. Diperlukan strategi sistem zonasi oleh pemerintah dalam pemerataan serta memperluas pendidikan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi wilayah penerimaan siswa di suatu sekolah. Dalam implementasinya, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan zonasi diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, serta memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, kebijakan zonasi juga mampu mengurangi beban biaya transportasi siswa dan mengurangi kemacetan di sekitar sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakry, A. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*. 2(1) : 1-13.
- Elwijaya, Fadiyah, dkk. 2021. *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Riset Tindakan Indonesia. 6(1) : 67-71.
- Fat Kuroji, F. 2017. Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*. 2(2): 28-40.
- Kemendikbud dan Setjen. 2018. Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. *Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan*, 11-28.
- Pradewi, Gunarti Ika dan Rukiyati. 2019. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. 4(1): 28-34.